DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*Tahun 2015
- Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Inu Kencana Syafiie, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Juniarso Ridwan dan Achmatd Sodik sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.
- Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 47/KEP/DINZIN/2011 Tentang Penetapan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakaarta Nomor:

 48/KEP/DINZIN/2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

 Kepala. Dinas Perizinan kepada Pejabat Struktural Eselon III Di Dinas

 Perizinan Untuk Menandatangani Perizinan;
- Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakaarta Nomor:

 42/KEP/DINZIN/2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)

 Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
- Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor:

 49/KEP/DINZIN/2013 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP)

 Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas perizinan Kota Yogyakarta;

- Lembaga Administrasi Negara, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, Jakarta, 2003.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Izin Gangguan di Derah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Petunjuk

 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005

 Tentang Izin Gangguan.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 *Tentang Retribusi Izin Tertentu*.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 Tentang
 Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter danStandar Pelayanan Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Sinambela Poltak lijan dkk, Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasinya, Bumi aksara, Jakarta, 2006,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014

Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonanntie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450.

Undang Undang Rebublik Indonesia Nomor: 25 tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*.

Internet

Khafidsociality.blogspot.id/2011/07/ Pelayanan publik.htm.